

EDITORIAL

Reformasi telah berjalan selama 20 tahun. Namun, persoalan integrasi nasional tetap mengemuka dalam masyarakat Indonesia. Politik identitas yang berbasis primordialisme seperti agama, suku, dan antargolongan sering kita lihat dan menjadi konsumsi masyarakat. Jika persoalan tidak mendapatkan perhatian, ancaman disintegrasi bangsa yang berakar dari perpecahan sosial akan semakin meningkat. Realitas itu menginspirasi tim redaksi *Jurnal Sejarah Citra Lekha* untuk mengangkat tema khusus pada edisi ini, yakni integrasi nasional dan multikulturalisme. Secara sederhana, integrasi nasional dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Proses penyatuan itu mencakup berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah dalam membentuk identitas nasional serta membangun rasa kebangsaan dengan menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan primordial. Strategi ini penting mengingat, sebagai sebuah bangsa dengan budaya yang begitu beragam, Indonesia akan terus mengalami ancaman dari luar. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan, integrasi nasional juga akan selalu berhadapan dengan persoalan internal seperti gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Nilai-nilai fundamental yang disepakati dan dijadikan rujukan bersama penting untuk selalu dipromosikan sebagai upaya untuk menghasilkan integrasi nasional tidak lain karena integrasi nasional merupakan *conditio sine qua non* yang harus dipenuhi untuk mencapai kejayaan nasional.

Secara sosiologis, masyarakat Indonesia tercakup ke dalam subsistem-subsistem yang relatif otonom. Masing-masing subsistem terbentuk atas dasar primordialisme seperti ikatan kekerabatan, suku bangsa, agama, bahasa, budaya, daerah, dan kebiasaan. Masyarakat majemuk memiliki potensi konflik karena tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok, memiliki lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer, dan kurang mengembangkan konsensus di antara anggotanya terhadap nilai-nilai yang fundamental. Konflik dapat pula terjadi karena integrasi kadang kala terbentuk melalui paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Hal ini mengindikasikan adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Tegangan antara integrasi dan konflik dalam masyarakat Indonesia baik yang berhubungan dengan kemajemukan, krisis politik, kegagalan dalam mengelola kemajemukan, pembatasan partisipasi politik, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi, pembatasan akses masyarakat tempatan terhadap sumber daya ekonomi, dan rezim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya, merupakan topik-topik yang menjadi perhatian para kontributor *JSCL* Vol. 3 No. 1 Februari 2018. Ada enam kontributor yaitu Singgih Tri Sulistiyono dengan artikel berjudul “Nasionalisme, Negara-Bangsa, dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah?”; Endang Susilowati dan Noor Naelil Masruroh dengan artikel berjudul “Merawat Kebhinekaan Menjaga Keindonesiaan: Belajar dari Nilai Keberagaman dan Kebersatuan Masyarakat Pulau”; Tri Karyanti dengan artikel berjudul “Elite dan Integrasi Sosial dalam Masyarakat Pagersari, Mungkid, Magelang 1967-1988”; Widhi Setyo Putro dalam artikel berjudul “Konferensi Inter-Indonesia Tahun 1949: Wujud Konsensus Nasional antara Republik Indonesia dengan *Bijeenkomst voor Federaal Overleg*”; Tri Wahyuning M. Irsyam dalam artikel berjudul “Kristenisasi di Pulau Dewata pada Era Kolonial Belanda”; dan Aryono, “Pergulatan Aliran Kepercayaan dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden”.

Multikulturalisme tampaknya menjadi jalan dan strategi yang paling rasional untuk membangun integrasi nasional. *Bhinneka Tunggal Ika* tidak sekadar menjadi slogan, tetapi merasuk ke dalam ruang kesadaran setiap warga negara. Hal ini karena setiap kebudayaan dan masyarakatnya memiliki nilai dan kedudukan yang sama dan karena itu berhak mendapatkan tempat yang setara. Menghormati dan menghargai kebudayaan lain, terlepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan kebudayaan itu, juga akan melahirkan empati, modal hidup paling dasar dalam masyarakat majemuk.

Laksana sebuah keping mata uang, kemajemukan yang menjadi karakter bangsa Indonesia memiliki dua sisi, berkah sekaligus musibah. Kemajemukan menjadi berkah karena ia telah membentuk kekayaan budaya. Akan tetapi, kemajemukan akan menjadi musibah apabila atas nama kemajemukan warga negara yang tidak memiliki kesadaran hidup bersama selalu memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyumbang munculnya berbagai macam konflik. Oleh karena itu, jika ada sebagian pihak yang menyatakan bahwa multikulturalisme adalah bahasa indah yang menipu, adalah sesuatu yang salah. Multikultural adalah realitas objektif yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pemahaman atasnya merupakan strategi paling rasional untuk membangun integrasi nasional Indonesia.

Tim redaksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kontributor yang telah membagi gagasan dan pengetahuan yang mencerahkan mereka melalui JSCL edisi ini. Selamat membaca.

Mahendra Pudji Utama
Rabith Jihan Amaruli